

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian. Dalam bagian ini, akan dijelaskan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan efektivitas, pengelolaan keuangan desa, dan pembangunan fisik.

2.1.1 Manajemen Pemerintahan

2.1.1.1 Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pada kegiatan kegiatan sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber ekonomi (faktor produksi) untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Menurut Hasibuan (2020:1) manajemen adalah “Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. Sedangkan menurut Yahya (2017:1), “Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha anggota dan penggabungan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Menurut Sukmara, AR. (2026: 70) bahwa :

Manajemen merupakan suatu proses sistematis yang melibatkan serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian terhadap berbagai sumber daya yang dimiliki organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, peneliti sampai pada pemahaman bahwa manajemen adalah sebagai ilmu dan seni dalam melakukan tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengendalian secara terarah melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

2.1.1.2 Fungsi-Fungsi Manajemen

Terdapat beberapa fungsi dalam manajemen. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan (2020: 113) sebagai berikut:

- a) *Planning* (perencanaan)
Yaitu suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan (*strategi*) untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
- b) *Organizing* (pengorganisasian)
Pengorganisasian adalah suatu proses dimana pegawai dan pekerjaannya saling dihubungkan untuk mencapai tujuan perusahaan.
- c) *Staffing* (pengisian staff)
Yaitu suatu proses untuk memastikan bahwa pegawai yang kompeten dapat dipilih, dikembangkan dan diberi imbalan untuk mencapai tujuan perusahaan.
- d) *Leading* (memimpin)
Memimpin adalah suatu proses memotivasi individu atau kelompok dalam suatu aktivitas hubungan kerja (*task related activities*) agar mereka dapat bekerja dengan sukarela (*voluntarily*) dan harmonis dalam mencapai tujuan perusahaan.
- e) *Controlling* (pengendalian)
Pengendalian merupakan suatu proses untuk memastikan adanya kinerja yang efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Terry (2018: 77-78) sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planing*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Penggerakan (*Actuating*)
4. Pengawasan (*Controlling*)

Sedangkan menurut Solihin (2019: 4) bahwa

Manajemen dikelompokkan ke dalam lima fungsi, kelima fungsi tersebut yaitu:

- a) *Planning* (perencanaan)
Yaitu suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan (strategi) untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
- b) *Organizing* (pengorganisasian)
Pengorganisasian adalah suatu proses dimana pegawai dan pekerjaannya saling dihubungkan untuk mencapai tujuan perusahaan.
- c) *Staffing* (pengisian staff)
Yaitu suatu proses untuk memastikan bahwa pegawai yang kompeten dapat dipilih, dikembangkan dan diberi imbalan untuk mencapai tujuan perusahaan.
- d) *Leading* (memimpin)
Memimpin adalah suatu proses memotivasi individu atau kelompok dalam suatu aktivitas hubungan kerja (*task related activities*) agar mereka dapat bekerja dengan sukarela (*voluntarily*) dan harmonis dalam mencapai tujuan perusahaan.
- e) *Controlling* (pengendalian)
Pengendalian merupakan suatu proses untuk memastikan adanya kinerja yang efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut *manajing* dan orang yang melakukannya disebut *manajer*.

2.1.1.3 Tingkatan Manajemen

Berdasarkan tingkatannya, manajemen terbagi menjadi beberapa tingkatan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Subkhi dan Jauhar (2018: 154) sebagai berikut:

1. Manajemen Lini Pertama (*first-line management*)
Tingkatan ini dikenal pula dengan istilah manajemen operasional, merupakan manajemen tingkatan paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi pegawai non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi.
2. Manajemen Tingkat Menengah (*middle management*)
Tingkatan ini mencakup semua manajemen yang berada di antara manajemen lini pertama dan manajemen puncak dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya.
3. Manajemen Puncak (*top management*)
Tingkatan ini dikenal pula dengan istilah executive officer, yang bertugas untuk merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan.

Selanjutnya menurut Schein (2018: 9) bahwa organisasi memiliki tiga tingkatan manajemen yaitu sebagai berikut:

1. *Top Manager*
Manajer eksekutif yang bertanggung jawab atas kinerja organisasi secara keseluruhan.
2. *Middle Manager*
Manajer yang bertanggung jawab atas penentuan tujuan sesuai dengan tujuan top manajemen, merencanakan dan menetapkan strategi sub unit untuk mencapai tujuan tersebut.
3. *First Line Manager*
Manajer yang bertanggung jawab atas operasional organisasi. Manajer ini bertugas melatih dan mengawasi kinerja bawahan non manajerial dan secara langsung bertanggung jawab untuk menghasilkan produk atau jasa perusahaan.

Sedangkan menurut Allen dalam Rivai (2019: 8) bahwa pada umumnya tingkatan atau level manajemen terdiri dari beberapa tingkatan diantaranya yaitu:

1. *Top management, terdiri dari board of director atau chief of executive, dan juga senior executive*
2. *Midle management; terdiri dari departement of division head*
3. *Lower management; terdiri atas superintenden, general foreman, dan juga supervisor*

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkatan atau level manajemen meliputi manajemen lini pertama (*first-line management*), manajemen tingkat menengah (*middle management*) dan manajemen puncak (*top management*).

2.1.1.4 Azas-azas Manajemen

Menurut Terry (2018: 9), asas manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan) :

1. *Planning* (Perencanaan)
Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.
2. *Actuating* (Pelaksanaan)
 Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama
3. *Controlling* (Pengawasan)
 Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Sunyoto (2018:4) Fungsi manajemen adalah sebagai berikut.

- a. Perencanaan
 Fungsi perencanaan meliputi penentuan program sumber daya manusia yang akan membantu pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.
- b. Pengorganisasian

Fungsi pengorganisasian adalah membentuk organisasi dengan merancang susunan dari berbagai hubungan antara jabatan, personalia dan faktor-faktor fisik.

c. Pengarahan

Fungsi pengarahan adalah mengusahakan agar pegawai mau bekerja secara efektif melalui perintah motivasi.

d. Pengendalian

Fungsi pengendalian adalah mengadakan pengamatan atas pelaksanaan dan membandingkan dengan rencana dan mengoreksinya jika terjadi penyimpangan atau jika perlu menyesuaikan kembali rencana yang telah dibuat.

Pendapat lain sebagaimana dikemukakan oleh Rivai dan Sagala (2018:13) bahwa: “Fungsi manajemen terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*) dan pengendalian (*controlling*)”.

Manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi, Menurut Hasibuan(2020:40) bahwa:

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternative yang ada.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menempatkan wewenang yang secara relatif didelegasikan pada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

c. Pengarahan

pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.

d. Pengendalian

Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen adalah serangkaian bagian-bagian dalam manajemen yang harus diaplikasikan sehingga tujuan serta visi dan misi perusahaan dapat tercapai. Adapun bagian bagian dalam manajemen tersebut lebih dikenal dengan perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), pengawasan (*controlling*).

2.1.1.5 Unsur-unsur Manajemen

Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manusia yang memiliki sumber daya yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, pegawai, dan masyarakat. Menurut Hasibuan (2020:2) manajemen terdiri dari enam unsur (6 M) yaitu :

- a. *Man* (Manusia)
Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja.
- b. *Money* (Uang)
Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dengan jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu uang merupakan alat (tools) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.
- c. *Materials* (Bahan-bahan)
Materi terdiri dari bahan setengah jadi (*raw material*) dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak

dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki.

d. *Machines* (Mesin)

Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja.

e. *Methods* (Metode)

Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusia itu sendiri.

f. *Market* (Pasar)

Memasarkan produk barang sudah tentu sangat penting, sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh karena itu, penguasaan pasar dalam arti menyebar hasil produksi merupakan faktor penentu di dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli (kemampuan) konsumen.

Menurut Harahap dan Amanah (2018:6) Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diperlukan alat-alat sarana (*tools*). *Tools* merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. *Tools* tersebut dikenal dengan enam M yaitu *men, money, materials, machines, method, dan markets* :

1. *Men* (Manusia) merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya, manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan.
2. *Money* (Uang) merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil

kegiatan dapat diukur dengan jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat (*tools*) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu diperhitungkan secara rasional.

3. *Material* (Bahan) terdiri dari bahan setengah jadi (*raw material*) dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga dapat menggunakan bahan/materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan mencapai hasil yang dikehendaki.
4. *Machine* (Mesin) digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja.
5. *Method* (Metode) adalah suatu tata kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha.
6. *Market* (pasar) adalah tempat dimana organisasi menyebarluaskan (memasarkan) produknya. Memasarkan produk tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan terhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan.

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai diperlukan sebuah sarana, yakni sebuah sarana manajemen yang terdiri dari *men*, *money*, *material*, *machine*, *method*, dan *market* atau yang lebih dikenal dengan 6 M (Firmansyah dan Mahardika, 2018:6) yaitu :

- 1) *Men* yakni sumber daya manusia yang melakukan kegiatan manajemen dan produksi. Dengan adanya faktor SDM, kegiatan manajemen dan produksi dapat berjalan, karena pada dasarnya faktor SDM sangat berperan penting dalam kegiatan manajemen dan produksi.
- 2) *Money* yakni faktor pendanaan atau keuangan. Tanpa ada keuangan yang memadai kegiatan perusahaan atau organisasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, karena pada dasarnya keuangan ialah darah dari perusahaan atau organisasi. Hal keuangan ini berhubungan dengan masalah anggaran (*Budget*), upah karyawan (*Gaji*), dan pendapatan perusahaan atau organisasi.
- 3) *Materials* yakni berhubungan dengan barang mentah yang akan diolah menjadi barang jadi. Dengan adanya barang mentah maka dapat

dijadikan suatu barang yang bernilai sehingga dapat mendatangkan keuntungan.

- 4) *Machine* yakni mesin pengolah atau teknologi yang dipakai dalam mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Dengan adanya mesin pengolah, maka kegiatan produksi akan lebih efisien dan menguntungkan.
- 5) *Method* yakni tata cara melakukan kegiatan manajemen secara efektif dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran agar tercapai suatu tujuan akan dituju.
- 6) *Market* yakni tempat untuk memasarkan produk yang telah dihasilkan. Seorang manajer pemasaran dituntut untuk dapat menguasai pasar, sehingga kegiatan pemasaran hasil produksi dapat berlangsung. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang haruslah sesuai dengan selera konsumen dan daya beli masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa unsur-unsur manajemen terdiri dari manusia sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan, uang sebagai salah satu penunjang berhasilnya tujuan dan sarana prasarana yang dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan seperti ketersediaan mesin serta petunjuk penggunaannya sehingga suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan mudah dan hasilnya dapat disampaikan secara luas.

2.1.1.6 Pengertian Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan merupakan salah satu aspek krusial dalam tata kelola negara yang berfokus pada optimalisasi fungsi birokrasi untuk mencapai tujuan publik secara efisien, efektif, dan akuntabel. Secara ilmiah, manajemen pemerintahan tidak hanya menekankan pada aspek administratif, tetapi juga pada koordinasi, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya manusia, finansial, serta informasi yang dimiliki pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang maksimal. Pendekatan ini mengintegrasikan teori manajemen klasik dengan prinsip-prinsip tata kelola modern, sehingga setiap kebijakan dan program pemerintah dapat dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara sistematis.

Menurut Dewi dan Santoso (2021:45), menyatakan bahwa :

Manajemen pemerintahan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara efektif dan efisien.

Sementara itu, Rahayu (2022:78) menekankan bahwa : “Manajemen pemerintahan mencakup strategi pengelolaan organisasi publik yang mampu menjamin keterpaduan antara kebijakan, program, dan kinerja aparatur dalam menyediakan layanan kepada masyarakat”.

Lebih lanjut, Sutrisno (2023:112) menyatakan bahwa :

Manajemen pemerintahan merupakan sistem terintegrasi yang menitikberatkan pada koordinasi internal birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi-fungsi publik, sehingga setiap program pembangunan, termasuk pembangunan fisik desa, dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara nyata.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan adalah suatu pendekatan ilmiah dan sistematis dalam mengelola seluruh sumber daya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Konsep ini menekankan integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta koordinasi yang baik. Dengan demikian, manajemen pemerintahan tidak hanya bertujuan mencapai target administratif, tetapi juga memastikan setiap program, termasuk pengelolaan dana desa untuk pembangunan fisik, memberikan manfaat optimal dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

2.1.1.7 Tujuan Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan sesuai rencana

serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Secara ilmiah, tujuan manajemen pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target administratif atau kuantitatif, tetapi juga mencakup aspek kualitas layanan publik, efisiensi penggunaan sumber daya, dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang tujuan manajemen pemerintahan menjadi landasan penting dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap program pembangunan, termasuk pengelolaan dana desa untuk pembangunan fisik.

Menurut Purnomo dan Santosa (2021:53), menyatakan bahwa : “Tujuan manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui perencanaan yang matang, pengorganisasian yang terstruktur, pengarahan yang jelas, dan pengendalian yang konsisten”. Sementara itu, Rahayu (2022:82) menyatakan bahwa : “Tujuan manajemen pemerintahan adalah menciptakan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel agar setiap keputusan dan program pemerintah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal”.

Lebih lanjut, Setiadi (2023:97) menegaskan bahwa :

Manajemen pemerintahan bertujuan untuk mengintegrasikan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi informasi dalam sistem kerja yang terkoordinasi sehingga setiap program pembangunan dapat memberikan hasil yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dari beberapa pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen pemerintahan adalah mencapai keseimbangan antara efisiensi administrasi dan efektivitas pelayanan publik, dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antar elemen birokrasi. Tujuan ini tidak hanya

relevan dalam konteks organisasi pemerintah secara umum, tetapi juga sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa, termasuk pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan manajemen yang tepat, setiap program pembangunan fisik dapat direncanakan dan dijalankan secara optimal, sehingga manfaat yang diterima masyarakat dapat maksimal dan pembangunan desa berjalan secara berkelanjutan.

2.1.1.8 Fungsi Manajemen Pemerintahan

Fungsi manajemen pemerintahan merupakan pilar penting dalam tata kelola birokrasi yang efektif, karena menentukan bagaimana sumber daya pemerintah diorganisasikan, diarahkan, dan diawasi untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Secara ilmiah, fungsi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif semata, tetapi juga mencakup perencanaan strategis, pengendalian kinerja, serta pemeliharaan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan pemerintahan. Pemahaman yang mendalam tentang fungsi manajemen pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk merancang sistem kerja yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Dewi dan Santoso (2021:61), fungsi manajemen pemerintahan mencakup empat elemen utama, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*), yang secara terpadu menjamin tercapainya tujuan organisasi publik. Selanjutnya, Rahayu (2022:89) menekankan bahwa fungsi manajemen pemerintahan juga berperan dalam mengintegrasikan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi informasi sehingga setiap program pemerintah dapat berjalan secara efisien dan

tepat sasaran. Lebih lanjut, Setiadi (2023:104) menegaskan bahwa fungsi manajemen pemerintahan bertujuan untuk membangun koordinasi yang baik antarunit birokrasi, memfasilitasi pengambilan keputusan yang efektif, dan memastikan keberlanjutan program pembangunan melalui mekanisme pengawasan yang sistematis.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen pemerintahan meliputi serangkaian kegiatan yang saling terkait, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengendalian, dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Fungsi ini menjadi sangat relevan dalam konteks pembangunan desa, khususnya pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan fisik, karena setiap tahap fungsi manajemen memastikan bahwa perencanaan pembangunan tepat sasaran, pelaksanaan berjalan lancar, sumber daya digunakan secara optimal, dan hasil yang dicapai memberi manfaat nyata bagi masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.1.9 Prinsip-Prinsip Manajemen Pemerintahan

Prinsip-prinsip manajemen pemerintahan menjadi pedoman fundamental bagi setiap aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Secara ilmiah, prinsip-prinsip ini menekankan keseimbangan antara efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap manajemen, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Penerapan prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pengelolaan sumber daya pemerintah dapat memberikan

pelayanan publik yang optimal sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Dewi dan Santoso (2021:68), prinsip manajemen pemerintahan meliputi efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, yang harus dijalankan secara terpadu agar setiap program pemerintah mampu memenuhi kebutuhan publik. Selanjutnya, Rahayu (2022:95) menekankan prinsip konsistensi dan adaptabilitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk tetap konsisten dengan kebijakan yang ada sambil menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi lapangan. Selain itu, Setiadi (2023:110) menegaskan pentingnya prinsip keterpaduan dan koordinasi antarunit, sehingga semua sumber daya manusia, finansial, dan teknologi informasi dapat bekerja secara sinkron dalam mendukung keberhasilan program pembangunan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip manajemen pemerintahan adalah pedoman yang mengatur bagaimana sumber daya dan proses birokrasi harus dikelola untuk mencapai tujuan publik secara optimal. Penerapan prinsip-prinsip ini, seperti efisiensi, akuntabilitas, transparansi, koordinasi, dan partisipasi masyarakat, menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan desa, khususnya pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan fisik. Dengan prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan secara konsisten, pelaksanaan pembangunan fisik desa dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup warga desa.

2.1.2 Konsep Efektivitas

2.1.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:28) merupakan keefektifan keadaan berpengaruh, kemanjuran, membawa hasil, hasil guna dan mulai berlaku.

Menurut Sudirman (2012:31) Efektivitas adalah :

Pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Pasolong (2007:9) menyatakan :

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab-akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai salah satu sebab dari variable lain. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Dengan demikian efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh seangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu.

Sedangkan menurut Kurniawan, (2005:109) mendefinisikan efektivitas adalah : “Kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasional kegiatan program

atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan yang maksimal.

Selanjutnya menurut Mahmudi (2005:92), mendefinisikan efektivitas merupakan : “Hubungan anantara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2009:59), yaitu:

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektifitas belum tentu efisiensi meningkat.

Dengan demikian efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu.

Efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terwujudnya suatu efek atau akibat yang telah terjadi dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran dalam arti tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas dapat diartikan sebagai tindakan dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah,

serta sangat penting peranannya didalam setiap badan pemerintahan dan berguna untuk melihat perkembangan serta kemajuan yang dicapai oleh instansi pemerintah atau suatu badan itu sendiri.

2.1.1.2 Ukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Efektivitas juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan yang dihasilkan yang lebih banyak bersifat tidak berwujud yang tidak mudah dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering mengalami kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara bentuk pernyataan saja, artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula.

Menurut Danim (2014:119-120) menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*)
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan mutu)
3. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Maka sependapat mengenai ukuran-ukuran untuk mengukur efektivitas menurut Siagian (Cahyono, 2016:21) mengemukakan ukuran-ukuran efektivitas sebagai berikut:

1. Ukuran waktu, merupakan pengukuran ketepatan waktu untuk jenis khusus pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu pekerjaan.
2. Ukuran hasil, yaitu jumlah kerja merupakan pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Hal ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.
3. Ukuran ketelitian, yaitu merupakan pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran akurat atau tidak yaitu seberapa baik penyelesaian hal ini berkaitan dengan bentuk keluaran.

Sedangkan Makmur (2015:122) menjelaskan bahwa:

Perencanaan adalah sebuah proses kegiatan dalam rangka menghasilkan rencana yang akan digunakan atau dengan kata lain sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan kegiatan yang rinciannya tergambar dalam rencana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, meunjukkan sejauh mana organisasi, program atau kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Pendapat para ahli di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki sesuai dengan harapan yang ditunjukkan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat. Sehubungan dengan hal yang diatas, maka pengukuran adalah penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sasaran yang tersedia, yang berarti jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif.

2.1.1.3 Pandangan-Pandangan Efektivitas

Suatu organisasi disebutkan aktif apabila para anggotanya merasa puas. Dalam pandangan ini hubungan antar manusia menempatkan kepuasan anggota sebagai inti persoalan organisasi dan manajemen. Dalam kenyataan sangatlah sulit melihat atau mempersamakan efektivitas organisasi dengan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan, hal ini disebabkan karena selalu ada penyesuaian target yang akan dicapai, serta dalam proses pencapaiannya selalu ada tekanan dari keadaan sekeliling.

Kenyataan dari hal tersebut selanjutnya menyebabkan bahwa jarang sekali target dapat tercapai secara keseluruhan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang luas mengenai apa yang dimaksud dengan efektivitas. Dalam efektifitas kerja, terdapat beberapa pandangan mengenai efektivitas. Pandangan efektivitas sangatlah beragam, namun demikian sebenarnya pandangan-pandangan efektivitas didasarkan pada hasil akhir tujuan yang dicapai organisasi (Iskandar, 2005:330).

Adapun menurut Gibson, (Iskandar, 2005:330-331) adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas individu yang menekankan pada hasil karya pegawai/anggota tertentu dalam organisasi serta prestasi individu nilai rutin lewat proses evaluasi hasil karya yang merupakan dasar bagi kenaikan gaji, promosi, dan imbalan lain yang tersedia dalam organisasi.
2. Efektivitas kelompok yang menekankan kepada bekerja secara bersama-sama dalam kelompok dan hasil yang dicapai jumlah kontribusi dari semua anggota.
3. Efektivitas organisasi terdiri dari individu dan kelompok yang menekankan pada hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya pada jumlah hasil karya tiap-tiap bagian.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas adalah suatu organisasi yang dibangun oleh terciptanya efektivitas baik individu, kelompok, maupun organisasi yang dilihat sejauh mana sasaran dan tujuan dapat dicapai sebagai mana rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Iskandar, (2005:227) menjelaskan bahwa: “Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan.

Sedangkan menurut Iskandar, (2005:332) mengemukakan bahwa: “Kriteria efektivitas dapat digunakan untuk mengukur pelaksanaan pembangunan serta pelaksanaan suatu program pemerintah dari segi upaya, pengaruh, hasil, penggunaan dana yang efektif dan proses”.

Berdasarkan pendapat tersebut dijelaskan bahwa sejauh mana penggunaan sumber dalam organisasi yang diarahkan untuk pencapaian program dari tujuan-tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Siagian (Iskandar, 2005:151) mengemukakan efektivitas kerja adalah:

Efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah ditetapkan. Artinya pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan. Dalam konteks yang lebih luas, dapat diartikan sampai seberapa jauh tujuan organisasi secara keseluruhan dapat tercapai.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan sejauh mana output dapat dicapai sesuai dengan apa yang

diharapkan dan sudah ditentukan baik dari segi waktu, kualitas maupun kuantitas dalam mewujudkan suatu tujuan dari organisasi.

2.1.3 Pengelolaan Dana Desa

Kata pengelolaan memiliki makna yang sama dengan *management* dalam bahasa Inggris, kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen. Menurut Suwardi (2012: 107) bahwa: "Manajemen atau pengelolaan diartikan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari pada sumberdaya terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang dilaksanakan". Kemudian Sukarna (2011:2) menyatakan bahwa: "Manajemen bertalian dengan bimbingan orang-orang dan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya". Sedangkan menurut Herlambang (2013:3) bahwa: Manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti tidak melakukan tugas-tugas itu sendirian.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, manajemen dapat diartikan tentang bagaimana mengatur sumber daya untuk melaksanakan berbagai tugas-tugas agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka fungsi manajemen dibutuhkan dalam suatu pengelolaan. Beberapa fungsi manajemen yang dimaksud adalah

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, motivasi, dan pengawasan.

Handoko (2014:8) mendefinisikan bahwa: "Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan". Kemudian Qalyubi (2012: 271) mengemukakan bahwa: Apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan. Sementara itu, Maryati (2014:8) menyatakan bahwa pengelolaan diartikan sebagai sarana dan sumberdaya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara efektif dan efisien.

Berdasarkan definisi pengelolaan di atas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan pengelolaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat. Afifiddin (2013:3) menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan.
- i. Mengadakan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

Tujuan pengelolaan agar sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Menurut Usman (2014:34) ada beberapa tujuan pengelolaan yaitu:

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Berdasarkan uraian diatas bahwa Dalam konteks pembangunan desa, tujuan pengelolaan memiliki relevansi yang sangat penting, khususnya terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan fisik. Pengelolaan yang efektif memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat digunakan tepat sasaran, sesuai dengan prioritas pembangunan desa, dan diawasi dengan mekanisme yang transparan. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip manajemen pemerintahan modern, seperti efisiensi, efektivitas, koordinasi, dan partisipasi masyarakat, sehingga setiap kegiatan pembangunan fisik dapat direncanakan, dijalankan, dan dievaluasi secara sistematis untuk memberikan manfaat optimal bagi warga desa. Dengan demikian, tujuan pengelolaan bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan landasan strategis untuk menjamin keberhasilan program pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa adalah dana yang dialokasikan untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lainnya yang sah. Dana Desa juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang dialokasikan untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lainnya yang sah, yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan pelayanan dasar, dan meningkatkan kemampuan pemerintahan desa.

Menurut Sigit, (2020) menyatakan bahwa Dana Desa diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dijelaskan juga bahwa penyaluran Dana Desa mempunyai lima tujuan yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
2. Mengentaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek Pembangunan.

Oleh karena itu, dana desa dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada seluruh desa yang ada di Indonesia berupa pengalokasian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa dinyatakan bahwa Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

Rahmasari (2019:159) menjelaskan bahwa sebagai berikut :

Pengelolaan dana desa disusun untuk memberikan informasi yang dapat dipahami dan jelas dalam menyampaikannya. Dengan tujuan agar

pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan cara menerapkan sistem pelaporan yang baik. Sistem pelaporan disini mengarah pada kinerja aparatur desa yang menangani anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan akuntabel dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Disamping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa, apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Adapun tujuan dari dana desa berlandaskan hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa menurut Indrawati (2017:17) yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan publik didesa.
- b. Mengentaskan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian desa.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Selanjutnya Indrawati (2017:17) menyatakan bahwa pengalokasian dari dana desa diantaranya:

- 1) Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.
- 2) Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota.

- 3) Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot: 30% untuk jumlah penduduk, 20% untuk luas wilayah, dan 50% untuk angka kemiskinan.

Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan gubernur.

Selanjutnya Indrawati (2017:22) menyatakan bahwa dalam penetapan prioritas pembangunan dana desa perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan dana desa, diantaranya:

- a. Keadilan, yaitu: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan.
- b. Kebutuhan prioritas, yaitu: mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- c. Kewenangan desa, yaitu: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa.
- d. Partisipatif, yaitu: mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat.
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu: pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan ketrampilan warga desa dan kearifan lokal.
- f. Tipologi desa, yaitu: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terutama, untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya menurut Indrawati (2017:22) :

- a. Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan:
 - 1) Sarana prasarana desa, meliputi:
 - a) Lingkungan pemukiman, antara lain: pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah.

- b) Transportasi antara lain: jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa, tambatan perahu.
 - c) Energy antara lain: pembangkit listrik, tenaga disel, jaringan distribusi tenaga listrik.
 - d) Informasi dan komunikasi antara lain: internet, telepon umum, website desa
- 2) Sarana prasarana sosial pelayanan dasar, meliputi:
 - a) Kesehatan masyarakat, antara lain: air bersih, MCK, posyandu, polindes.
 - b) Pendidikan dan kebudayaan, antara lain: perpustakaan desa.
- 3) Sarana prasarana usaha ekonomi desa, meliputi:
 - a) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, antara lain: embung desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan dan kandang ternak.
 - b) Usaha ekonomi pertanian atau lainnya bersekal produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa, satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran antara lain: lumbung desa, cold storage, pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi, peralatan bengkel, kendaraan bermotor.
- 4) Sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup, meliputi:
 - a) Kesiapsiagaan menanggapi bencana alam.
 - b) Penanganan bencana alam.
 - c) Penanganan kejadian luar biasa lainnya.
 - d) Pelestarian lingkungan hidup.
- 5) Sarana prasarana lainnya.
- b. Penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk:
 - 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
 - 2) Pengembangan kapasitas masyarakat desa.
 - 3) Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
 - 4) Pengembangan system informasi desa.
 - 5) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.
 - 6) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes Bersama.
 - 7) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya
 - 8) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
 - 9) Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
 - 10) Dukungan kesiapsiagaan menanggapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta kejadian luar biasa lainnya.

- 11) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Menurut Mardiasmo (2018 :24), ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan desa, sebagai berikut :

1. Prinsip Transparansi atau Keterbukaan
Transparansi yang dimaksud adalah memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.
2. Prinsip Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.
3. Prinsip *Value of Money*
Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan ketiga prinsip dalam pengelolaan keuangan desa apabila diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Transparansi atau Keterbukaan

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan karena keuangan itu sendiri adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat.

Sabarno (2010:38) menyatakan bahwa :

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Yuliana (2022:18) menyatakan bahwa :

Transparansi merupakan konsep yang menjamin bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi-informasi dalam penyelenggaraan pemerintah, seperti kebijakan yang ditetapkan, proses yang dilakukan, serta hasil yang telah dicapai. Transparansi harus dibangun atas dasar kebebasan informasi yang dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya dimana informasi yang disampaikan dapat disediakan secara memadai dan dimengerti sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat diketahui bahwa transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. Partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban.

2. Prinsip Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo dalam Yunita dan Chirtianingrum (2018:10) menyatakan bahwa :

Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pemegang kepercayaan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan semua kegiatan dan kegiatannya yang merupakan tanggung jawabnya kepada prinsip yang memiliki hak dan wewenang untuk menerima pertanggungjawaban.

Menurut Hoesada (2019:273) Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap Pemerintah melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Abdul Halim dan Muhamad Ikbil (2012:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Nasruddin (2019:38) menyatakan bahwa :

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengendalian dan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja.

Prinsip akuntabilitas adalah pilar penting dalam rangka mencegah terjadinya korupsi. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar kebijakan dan langkah-langkah atau kinerja yang dijalankan sebuah Lembaga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu Akuntabilitas membutuhkan perangkat-perangkat pendukung, baik berupa perundang-undangan maupun dalam bentuk komitmen dan pendukung Titi (2019:17) Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika kita mendengar kata Akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata Akuntabilitas sering disamakan dengan tanggung jawab atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua kata konsep tersebut memiliki arti yang berbeda.

Mardiasmo, (2018:127) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accounting for Probity and Legality*)
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan menghindari penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal
4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertimbangan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dan masyarakat luas.

3. Prinsip *Value of Money*

Dalam kaitan dengan penganggaran prinsip *value for money* digunakan untuk menilai apakah daerah telah mendapatkan manfaat maksimal dari belanja yang dilakukan serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Beberapa hal memang sulit untuk diukur, tidak berwujud, dan bersifat subjektif sehingga sering disalah artikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pertimbangan yang matang dalam menentukan apakah prinsip *value for money* telah diterapkan dan dicapai dengan baik.

Suharto (2019: 121), menjelaskan bahwa :

Value for money adalah *value for money* untuk melihat apakah uang organisasi dapat memperoleh keuntungan dari barang atau jasa dari sumber daya yang disediakan pada saat itu sambil mempertimbangkan kombinasi antara kualitas, biaya, penggunaan sumber daya dan kecukupan dengan menguji kecepatan dan kemudahan pencapaian tujuan.

Mardiasmo (2018 : 130) menyatakan bahwa :

Penerapan konsep *value for money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang diinginkan dalam melakukan *value for money* pada organisasi sektor publik yaitu : ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya, dan efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Selanjutnya menurut Mardiasmo (2018 : 136) menyatakan bahwa indikator dalam *Value For Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintahan. Berikut pengertian dari masing-masing indikator tersebut :

1. Ekonomis

Ekonomis merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis dapat diartikan sebagai suatu perbandingan pada input (masukan) dengan input value (nilai dari masukan), yang dinyatakan dengan satuan moneter. Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat menjalankan

dan meminimalisir input *resource* dengan menghindari sebuah pengeluaran yang tidak produktif atau pengeluaran yang boros.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimal dengan nilai input tertentu atau penggunaan input yang serendahnya untuk mencapai suatu output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input yang kemudian dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

3. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu tingkatan dari pencapaian hasil program maupun kegiatan organisasi dengan target yang telah ditetapkan. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan input.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator *Value for Money* (VfM) menjadi elemen sentral dalam pengukuran kinerja organisasi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap program atau kegiatan pemerintah tidak hanya dinilai dari besarnya anggaran yang digunakan, tetapi lebih pada sejauh mana penggunaan dana tersebut menghasilkan manfaat yang maksimal, efisien, dan efektif bagi masyarakat. Dengan kata lain, *Value for Money* menekankan keseimbangan antara biaya, kualitas, dan hasil yang dicapai, sehingga pengelolaan anggaran pemerintah dapat dievaluasi secara objektif dan akuntabel, menjadi dasar perbaikan kinerja birokrasi, dan memastikan bahwa setiap dana publik memberikan manfaat nyata sesuai tujuan pembangunan.

2.1.4 Kualitas Pembangunan Fisik Desa

2.1.4.1 Pengertian Kualitas Pembangunan

Kualitas pembangunan merupakan konsep yang menunjukkan sejauh mana hasil pembangunan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan merata. Dalam perspektif

pembangunan di Indonesia, konsep ini banyak dijelaskan oleh beberapa ahli yang menekankan aspek ekonomi, pemerataan, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Kuncoro (2019:45) menyatakan bahwa :

Kualitas pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan daerah atau negara dalam mengurangi kesenjangan pendapatan, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya, Sjafrizal (2018:72) menjelaskan bahwa :

Kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh keberhasilan pemerintah dalam menciptakan pemerataan pembangunan antarwilayah. Ketimpangan pembangunan yang rendah mencerminkan kualitas pembangunan yang baik karena manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat.

Selain itu, Sedarmayanti (2022:110) menyatakan bahwa :

Kualitas pembangunan sangat erat kaitannya dengan good governance, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas kebijakan, serta partisipasi masyarakat. Pembangunan yang berkualitas akan tercapai apabila proses penyelenggaraan pemerintahan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup pemerataan hasil pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kualitas tata kelola pemerintahan. Pembangunan yang berkualitas harus bersifat inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.4.2 Pengertian Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah yang berfokus pada penciptaan sarana dan prasarana nyata yang mendukung kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Secara ilmiah, pembangunan fisik tidak hanya menekankan pada jumlah atau volume infrastruktur yang dibangun, tetapi juga pada kualitas, keberlanjutan, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Pemahaman yang komprehensif mengenai pembangunan fisik memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap proyek pembangunan dengan tepat sasaran dan efektif.

Menurut Budiani (2021:54), pembangunan fisik adalah proses kegiatan pembangunan yang menghasilkan output berupa infrastruktur dan fasilitas nyata yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat, serta harus memenuhi standar teknis yang berlaku. Sementara itu, Prasetyo (2022:88) menyatakan bahwa pembangunan fisik mencakup seluruh kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik, termasuk jalan, gedung, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, yang dirancang untuk mendukung pelayanan masyarakat secara optimal. Lebih lanjut, Sutrisno (2023:101) menekankan bahwa pembangunan fisik harus diukur dari tiga aspek utama, yaitu kuantitas, kualitas, dan fungsionalitas, agar manfaat yang diberikan dapat dirasakan secara nyata dan berkelanjutan oleh masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan fisik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan

pembangunan yang menghasilkan sarana dan prasarana nyata dengan memperhatikan kuantitas, kualitas, dan manfaatnya. Pembangunan fisik tidak hanya diukur dari jumlah atau volume bangunan, tetapi juga dari kualitas teknis, daya tahan, dan fungsionalitasnya dalam mendukung kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, pembangunan fisik dapat meningkatkan kesejahteraan warga, memperkuat infrastruktur publik, dan menjamin keberlanjutan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

2.1.4.3 Tujuan Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik merupakan bagian integral dari pembangunan wilayah yang berorientasi pada peningkatan fungsi sarana dan prasarana guna menunjang kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Secara ilmiah, tujuan pembangunan fisik tidak sekadar menjawab kebutuhan struktural, tetapi juga dimaknai sebagai upaya strategis untuk menciptakan lingkungan yang lebih produktif, aman, efektif, dan berdaya guna dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pembangunan fisik harus direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis dan terukur, sehingga hasilnya tidak hanya tampak secara kuantitatif, tetapi juga memberikan kontribusi bermakna terhadap kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Menurut Arsyad (2021:77), tujuan pembangunan fisik adalah menciptakan struktur fisik yang mendukung proses pembangunan secara lebih luas, seperti penyediaan jaringan transportasi yang mempermudah distribusi barang dan jasa serta aksesibilitas pelayanan bagi masyarakat. Selanjutnya, Mulyani (2022:143) menegaskan bahwa pembangunan fisik harus diarahkan untuk meningkatkan

kualitas lingkungan hidup dan keterhubungan antar ruang, sehingga setiap infrastruktur yang dibangun dapat memberikan nilai tambah bagi kehidupan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Nugroho (2023:59) menyatakan bahwa tujuan pembangunan fisik mencakup penciptaan infrastruktur yang efektif dalam mengatasi hambatan akses terhadap sumber daya dasar seperti air bersih, fasilitas pendidikan, dan kesehatan sehingga mendukung terciptanya pemerataan pembangunan yang berkeadilan di berbagai wilayah.

Dari pemikiran para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembangunan fisik mencakup beberapa aspek substansial, yakni penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar masyarakat. Dengan demikian, tujuan akhir pembangunan fisik bukan hanya terletak pada realisasi output fisik, tetapi juga pada pencapaian outcome yang memberi manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur komunitas, dan menutup disparitas pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

2.1.4.4 Indikator Kualitas Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik merupakan aspek krusial dalam pembangunan wilayah karena secara langsung memengaruhi kualitas hidup masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Agar pembangunan fisik dapat dievaluasi secara efektif, dibutuhkan indikator yang jelas dan terukur, sehingga setiap proyek dapat dipantau kemajuannya, kualitasnya, dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Indikator ini menjadi pedoman bagi pemerintah dan pemangku

kepentingan dalam memastikan bahwa kegiatan pembangunan benar-benar sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan.

Menurut Budiani (2021:61), indikator pembangunan fisik meliputi tiga aspek utama, yaitu :

1. Kuantitas

Kuantitas menekankan pada jumlah atau volume fisik yang direalisasikan dibandingkan dengan target perencanaan. Misalnya, panjang jalan yang dibangun, luas gedung, jumlah unit fasilitas umum, atau kapasitas sarana irigasi. Kuantitas menjadi indikator dasar karena memberikan gambaran objektif mengenai seberapa banyak proyek yang berhasil diselesaikan. Dengan pengukuran kuantitas, pemerintah atau pengelola proyek dapat mengevaluasi progres fisik, mengidentifikasi proyek yang tertunda, dan memastikan target pembangunan tercapai sesuai rencana.

2. Kualitas

Kualitas pembangunan fisik berkaitan dengan standar teknis, daya tahan, keamanan, dan mutu material yang digunakan dalam pembangunan. Pembangunan fisik yang baik harus memenuhi standar yang berlaku, sehingga infrastruktur dapat bertahan lama dan berfungsi optimal. Aspek kualitas ini juga mencakup kepatuhan terhadap spesifikasi teknis, pengawasan yang ketat, dan penggunaan tenaga kerja yang kompeten. Dengan fokus pada kualitas, setiap proyek pembangunan fisik tidak hanya memenuhi kuantitas, tetapi juga memiliki nilai tambah berupa keamanan, ketahanan, dan efisiensi penggunaan sumber daya.

3. Fungsionalitas

Fungsionalitas menilai sejauh mana infrastruktur yang dibangun memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pembangunan fisik harus mampu mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Misalnya, jalan yang dibangun mempermudah akses pasar, gedung balai desa mendukung kegiatan administratif dan sosial, sedangkan sarana irigasi meningkatkan produktivitas pertanian. Fungsionalitas memastikan bahwa pembangunan fisik tidak hanya menjadi simbol fisik atau administratif, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan outcome yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Prasetyo (2022:92) menegaskan bahwa indikator pembangunan fisik juga harus mempertimbangkan :

1. Efisiensi penggunaan sumber daya,
Efisiensi menekankan pemanfaatan dana, tenaga kerja, dan material secara optimal agar setiap rupiah atau tenaga yang dikeluarkan dapat memberikan hasil maksimal. Efisiensi menjadi tolok ukur penting dalam pembangunan fisik karena proyek yang efisien mampu menekan pemborosan, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas sumber daya. Dengan memperhatikan efisiensi, pengelola proyek dapat memastikan bahwa alokasi dana, termasuk Dana Desa, digunakan secara tepat dan tidak menimbulkan pemborosan yang dapat merugikan masyarakat.
2. Efektivitas perencanaan,
Efektivitas perencanaan menilai sejauh mana perencanaan pembangunan fisik mampu mencapai tujuan yang diharapkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang efektif mencakup penentuan prioritas proyek, penjadwalan yang realistis, dan pemanfaatan data serta informasi yang akurat. Perencanaan yang efektif memastikan proyek pembangunan fisik terlaksana tepat waktu, sesuai anggaran, dan memberikan hasil yang diharapkan, sehingga tujuan pembangunan fisik dapat tercapai secara optimal.
3. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
Keterlibatan masyarakat merupakan indikator penting dalam pembangunan fisik, karena partisipasi warga memastikan proyek sesuai dengan kebutuhan lokal dan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Keterlibatan masyarakat mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi proyek pembangunan. Dengan keterlibatan yang aktif, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai pengawas yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan fisik.

Selanjutnya, Sutrisno (2023:108) menambahkan bahwa indikator kualitas pembangunan fisik meliputi :

1. Output
Output merujuk pada hasil langsung yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan fisik. Misalnya, panjang jalan yang dibangun, luas gedung balai desa, jumlah unit fasilitas kesehatan, atau kapasitas sarana irigasi yang selesai dikerjakan. Output merupakan indikator terukur yang menjadi dasar evaluasi awal proyek, karena menunjukkan sejauh mana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Output bersifat konkret dan mudah dihitung, sehingga menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan proyek dalam jangka pendek.

2. Outcome

Outcome mencerminkan dampak atau manfaat jangka menengah hingga panjang yang diperoleh masyarakat dari pembangunan fisik. Berbeda dengan output yang bersifat kuantitatif, outcome menekankan pada kualitas manfaat dan perubahan yang terjadi akibat adanya infrastruktur tersebut. Outcome pembangunan fisik dapat berupa meningkatnya akses masyarakat ke pelayanan publik, peningkatan produktivitas ekonomi, kenyamanan sosial, serta keberlanjutan lingkungan. Outcome mengukur sejauh mana pembangunan fisik mampu memberikan nilai tambah nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedarmayanti (2022:110) menjelaskan bahwa kualitas pembangunan fisik berkaitan erat dengan efektivitas pengelolaan infrastruktur publik yang disediakan pemerintah indikatornya meliputi:

1. Kondisi fisik infrastruktur yang layak dan sesuai standar pelayanan.
Infrastruktur yang dibangun mampu mendukung aktivitas masyarakat secara optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar pelayanan publik yang berlaku. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah kondisi fisik infrastruktur yang layak dan sesuai standar pelayanan. Infrastruktur yang berada dalam kondisi baik, aman, dan memenuhi standar teknis menunjukkan bahwa pembangunan telah dilaksanakan secara tepat, tidak hanya berorientasi pada penyediaan fisik semata, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna.
2. Efektivitas pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur publik.
Kualitas pembangunan fisik juga sangat ditentukan oleh efektivitas pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur publik. Infrastruktur yang telah dibangun tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak diikuti dengan pengelolaan yang baik. Pemeliharaan yang terencana dan berkelanjutan akan memastikan infrastruktur tetap berfungsi sebagaimana mestinya serta dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.
Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik juga menjadi indikator penting dalam melihat kualitas pembangunan fisik. Ketersediaan fasilitas seperti jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi umum menunjukkan sejauh mana pemerintah mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Semakin lengkap dan merata ketersediaan sarana tersebut, maka semakin tinggi pula kualitas pembangunan fisik yang dicapai, karena masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan lebih mudah dan merata.
4. Responsivitas pembangunan terhadap kebutuhan masyarakat.
Responsivitas pembangunan terhadap kebutuhan masyarakat menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pembangunan yang berkualitas adalah

pembangunan yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan dan perhatian pemerintah terhadap kondisi riil masyarakat, sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

5. Keberlanjutan dan keberfungsian infrastruktur dalam jangka panjang.
Keberlanjutan dan keberfungsian infrastruktur dalam jangka panjang menjadi indikator yang menegaskan bahwa pembangunan fisik tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada manfaat jangka panjang. Infrastruktur yang berkelanjutan adalah infrastruktur yang tetap dapat berfungsi dengan baik, ramah lingkungan, serta mampu mendukung kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Dengan demikian, kelima aspek tersebut secara bersama-sama mencerminkan kualitas pembangunan fisik yang ideal, yaitu pembangunan yang layak, efektif, merata, responsif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator kualitas pembangunan fisik mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan dalam menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan infrastruktur di suatu wilayah, tidak hanya dari segi ketersediaannya, tetapi juga dari kondisi fisik yang layak dan sesuai standar pelayanan, efektivitas pemeliharaan serta pengelolaan infrastruktur publik, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, responsivitas pembangunan terhadap kebutuhan masyarakat, serta keberlanjutan dan keberfungsian infrastruktur dalam jangka panjang, sehingga secara keseluruhan kualitas pembangunan fisik mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menyediakan dan mengelola infrastruktur secara optimal, merata, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.5 Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik tidak terjadi secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

pembangunan dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Faktor-faktor tersebut dapat meliputi aspek perencanaan, sumber daya, partisipasi masyarakat, serta kebijakan dan regulasi yang mendukung. Dengan mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilan pembangunan fisik, pemerintah dan pengelola proyek dapat mengambil langkah strategis untuk meminimalkan hambatan dan memaksimalkan manfaat yang dihasilkan.

Menurut Budiani (2021:68), salah satu faktor utama yang memengaruhi pembangunan fisik adalah ketersediaan sumber daya, baik berupa dana, tenaga kerja, maupun material bangunan. Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi syarat utama agar pembangunan fisik dapat dilaksanakan sesuai rencana dan tepat waktu. Selanjutnya, Prasetyo (2022:101) menyatakan bahwa perencanaan yang matang dan sistematis juga sangat menentukan keberhasilan pembangunan fisik. Perencanaan mencakup penetapan prioritas proyek, estimasi biaya, jadwal pelaksanaan, serta analisis risiko, sehingga setiap kegiatan pembangunan dapat berjalan secara terkontrol dan terukur. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah keterlibatan masyarakat. Menurut Mulyani (2022:152), partisipasi warga dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan fisik meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta memastikan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan fisik dipengaruhi oleh tiga faktor utama: ketersediaan sumber daya yang memadai, perencanaan yang efektif dan sistematis, serta keterlibatan aktif masyarakat. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan saling memperkuat, sehingga

jika salah satu faktor diabaikan, keberhasilan pembangunan fisik akan terhambat. Oleh karena itu, pengelolaan pembangunan fisik yang baik harus memperhatikan ketiga aspek ini secara simultan untuk memastikan proyek pembangunan dapat terealisasi secara optimal, efisien, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

2.1.4.6 Evaluasi Pembangunan Fisik

Evaluasi pembangunan fisik merupakan proses penting untuk menilai sejauh mana kegiatan pembangunan telah mencapai tujuan yang direncanakan serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Evaluasi tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif seperti jumlah atau volume pembangunan, tetapi juga menilai kualitas pelaksanaan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta dampak yang dihasilkan. Dengan evaluasi yang sistematis, pihak pengelola dapat mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan hambatan dalam proyek pembangunan fisik, sehingga perbaikan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat.

Menurut Budiani (2021:72), evaluasi pembangunan fisik bertujuan untuk mengukur kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan proyek, termasuk pemanfaatan dana, tenaga kerja, dan material. Evaluasi ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, khususnya dalam proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh APBD atau Alokasi Dana Desa. Selanjutnya, Prasetyo (2022:105) menekankan bahwa evaluasi pembangunan fisik juga mencakup pengukuran output dan outcome, yakni keberhasilan realisasi proyek secara fisik serta dampak yang

dirasakan masyarakat. Evaluasi yang komprehensif memungkinkan perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas perencanaan di masa mendatang. Selain itu, Mulyani (2022:156) menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam evaluasi proyek memberikan perspektif yang lebih realistis mengenai manfaat pembangunan, sehingga evaluasi tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan harapan warga.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembangunan fisik merupakan alat strategis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan manfaat dari setiap proyek pembangunan. Evaluasi mencakup pengukuran kuantitas, kualitas, efisiensi penggunaan sumber daya, efektivitas perencanaan, serta partisipasi masyarakat. Dengan melakukan evaluasi yang sistematis dan komprehensif, pihak pengelola dapat memastikan proyek pembangunan fisik berjalan sesuai rencana, memanfaatkan sumber daya secara optimal, serta memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Evaluasi ini juga menjadi dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pembangunan di masa mendatang.

2.1.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

1. Desy Nayanti, 2025 dengan judul Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Balida Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Jurnal keuangan daerah, pusat dan kearsipan. Vol 2 no 1. halaman 56.

Desa di Indonesia berperan penting dalam pembangunan dan berada di bawah sistem pemerintahan. Kesiapan desa mengelola pemerintahan berpengaruh pada efektivitas pembangunan. Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya ekonomi. Namun, ada beberapa masalah seperti pembangunan jalan usaha tani yang belum selesai, rehabilitasi jembatan gantung yang belum terlaksana, dan pembuatan lapangan olahraga yang tertunda. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan 13 informan melalui purposive sampling dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa secara umum cukup efektif, tetapi ada masalah dengan waktu dan target yang tidak tercapai. Cuaca dan keterbatasan dana menjadi kendala. Meskipun prosedur dan kemampuan aparat masih kurang, partisipasi masyarakat cukup tinggi. Disarankan agar Kepala Desa meningkatkan pengawasan dan penggunaan dana, sementara aparat desa perlu memperhatikan proses pembangunan dan meningkatkan pendidikan. Masyarakat juga disarankan untuk lebih aktif dalam pengawasan pembangunan

2. Mulyana (2024) dengan judul Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*) Vol.11, No. 1, Juni 2024: 1-14.

Dana desa dinilai dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dana desa yang ada di Desa Tambusai Batang Dui perlu dikaji

efektivitas penerapannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dan faktor pendukung dan penghambat efektivitas dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tambusai Batang Dui. Metode penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, ditemukan bahwa adanya penganggaran yang dilakukan telah melibatkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui perangkat desa; pada dimensi tingkat kepuasan yang diperoleh, ditemukan bahwa masyarakat di Desa Tambusai Batang Dui terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu masyarakat yang sudah merasakan dampak dari adanya Dana Desa dan masyarakat yang belum merasakan dampaknya; pada dimensi produk kreatif, ditemukan bahwa Pemerintah Desa Tambusai Batang Dui menjalin kerjasama dengan generasi muda yang ada di desa; pada dimensi intensitas yang akan dicapai, ditemukan bahwa Pemerintah Desa Tambusai Batang Dui telah menyusun program yang berkelanjutan dan dapat melibatkan partisipasi masyarakat desa secara luas.

3. Nasution (2023). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kacamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol 5, No. 4, Mei 2023: 3112-3118,

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data diperoleh dari Data Sekunder yang terdiri dari: sejarah berdirinya, struktur organisasi, visi dan misi, dan sasaran yang ingin dicapai; data primer, diperoleh dari wawancara informan di lapangan. Untuk menganalisis efektivitas, digunakan teori Edward III, antara lain, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menemukan bahwa dari sisi komunikasi antara pegawai dan pengurus pemerintahan kampung sudah baik, namun meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia maupun material belum cukup memadai karena kekurangan pegawai pelaksana, serta sarana dan prasarana. Perangkat kampung, cukup berkomitmen dan bertanggung jawab dengan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan sesuai dengan prosedur yang telah disusun. Faktor-faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yang belum memadai, pegawai pemerintahan kampung yang sangat sedikit dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Penggunaan anggaran alokasi dana desa dapat

terselesaikan dengan baik namun kurangnya transparansi informasi menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat sehingga target pengalokasian dana belum tercapai.

4. Maria Vianey Rae (2022) Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains. Vol.2 No 2 (2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur sesuai dengan peraturan Permendagri No. 20 tahun 2018 di Desa Naisau Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total prioritas penggunaan Anggaran Dana Desa untuk lima bidang operasional desa, sesuai peraturan, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Namun, pada bidang pelaksanaan pembangunan desa terjadi penurunan anggaran dari tahun 2021 ke tahun 2022. Analisis pengelolaan dana desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Tahap perencanaan melibatkan perangkat desa dalam musyawarah dengan masyarakat setempat, yang kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun APBDesa. Pencairan dana desa dilakukan dalam tiga tahap, tetapi terkadang mengalami keterlambatan, yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan pembangunan. Tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan melalui swakelola, dengan rekrutan tenaga kerja dari

masyarakat setempat. Namun, terdapat kendala seperti penundaan waktu dan perijinan lahan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Penatausahaan dan pelaporan dilakukan oleh sekretaris desa dan BPD sebagai bentuk transparansi. Proses penatausahaan berjalan efektif tanpa kendala. Pelaporan dilakukan untuk memberikan informasi keuangan dan hasil pekerjaan kepada masyarakat desa.

5. Supriadin, (2024). dengan judul Efektivitas pemanfaatan dana desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan. Jurnal *Economica Insight* Vol. 1, No. 1, November 2024, pp. 1-6

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di wilayah pedesaan. Dana desa, sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah, dirancang untuk mendukung percepatan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa desa sebagai lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa secara optimal mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, yang berkontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, pengelolaan dana yang belum transparan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan pelatihan bagi aparatur desa, penguatan pengawasan penggunaan dana, dan mendorong partisipasi aktif

masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan pengelolaan yang tepat, dana desa dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan di pedesaan.

6. Milda Andini (2025) Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2023. Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Volume 8 Nomor 3 Bulan Oktober Tahun 2025 : 489 – 502

Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran strategis Dana Desa dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meskipun tingkat penyerapan Dana Desa di Desa Timoreng Panua relatif tinggi, efektivitas pemanfaatannya masih menjadi sorotan akibat berbagai permasalahan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan anggaran, potensi penyalahgunaan dana, serta pembangunan yang belum merata atau terhenti karena keterbatasan dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Timoreng Panua dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Timoreng Panua, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei,

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data kepada 95 responden yang dipilih dari populasi 2.091 jiwa dengan teknik simple random sampling. Data dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa termasuk dalam kategori efektif, dengan indikator keberhasilan program, kepuasan masyarakat, dan pencapaian sasaran berada di atas 70%. Pembangunan infrastruktur juga mengalami peningkatan signifikan. Faktor-faktor seperti partisipasi masyarakat, transparansi, dan kualitas pendamping desa turut memberikan kontribusi terhadap efektivitas penggunaan dana desa.

7. Isanini Fathor, 2024. berjudul : Efektivitas Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Kolor. Jurnal Inovasi Sektor Publik Volume 4, Nomor 3, 2024.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami bagaimana dana desa dimanfaatkan di Desa Kolor dan mengevaluasi efektivitasnya dalam pembangunan desa. Tujuan utama penelitian ini adalah menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi dari berbagai pihak terkait, seperti perangkat desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana desa di Desa Kolor dimulai dari perencanaan yang baik, yang melibatkan musyawarah desa (Musdes) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas program. Pengawasan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta transparansi disediakan melalui laporan pertanggungjawaban dan pemasangan informasi di media publik. Partisipasi aktif masyarakat juga terlihat dalam

pelaksanaan proyek melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yang melibatkan tokoh masyarakat. Meskipun ada variasi dalam tingkat partisipasi masyarakat di beberapa desa, di Desa Kolor aspirasi masyarakat didengarkan dan diimplementasikan dengan baik, menghasilkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dana desa di Desa Kolor telah dikelola dengan efektif, yang terbukti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penghargaan sebagai desa mandiri. Namun, efektivitas pengelolaan dana desa masih perlu dievaluasi lebih lanjut terkait dengan transparansi dan partisipasi yang berkelanjutan

8. Aan Anwar Sihabudin, 2023. Strategi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dalam Peningkatan Pelestarian Seni Dan Kebudayaan Guna Mewujudkan Visi Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 2023. Vol. 10. no 2.

Strategi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam Peningkatkan Pelestarian Seni dan Kebudayaan guna mewujudkan visi Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa adalah bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan kebudayaan daerah yang digambarkan dengan indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi, serta jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu, sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan

pembangunan kepariwisataan yang sekaligus berperan sebagai salah satu sector yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan seni dan kebudayaan potensi daerah yang sesuai RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yakni Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa". Perumusan strategi terdiri dari pengembangan misi, identifikasi faktor eksternal (peluang dan ancaman), menentukan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), menyusun tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi yang tepat untuk dilaksanakan. Dengan demikian pengembangan pelestarian untuk memanfaatkan potensi seni dan kebudayaan guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Namun ada beberapa permasalahan diantaranya yaitu belum optimalnya intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya, belum optimalnya upaya dalam menarik penyelenggaraan kegiatan festival, kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan festival seni dan budaya, belum optimalnya promosi Kabupaten Pangandaran sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai festival, kemudahan bagi penyelenggara festival dalam menyelenggarakan event, belum optimalnya benda, situs dan kawasan cagar

budaya yang dilestarikan (30 pada tahun 2020), belum optimalnya jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (30) pada tahun 2020), belum ditetapkannya situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Pangandaran, belum optimalnya perhatian dinas teknis terhadap cagar budaya dan terbatasnya SDM

9. Arie Budiawan, 2024. Pelaksanaan Revitalisasi Budaya Rarakaan Sebagai Kearifan Lokal di Desa Sukaharja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Volume 11 Nomor 2, Bulan Agustus Tahun 2024.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Budaya Rarakaan merupakan kearifan lokal masyarakat Desa Sukaharja yang mengandung nilai-nilai pelestarian lingkungan. Namun, budaya ini mulai terkikis seiring perkembangan jaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya Rarakaan serta upaya revitalisasinya sebagai bagian dari pelestarian lingkungan, kelestarian hutan, menghargai alam, solidaritas sosial, dan spiritual religius di Desa Sukaharja. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya revitalisasi budaya Rarakan telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya lokal. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, seperti lomba tumpeng, lomba membuat makanan tradisional, dan merangkai gunungan hasil pertanian masyarakat dalam upacara adat, berhasil

menghidupkan kembali tradisi yang hampir terlupakan. Selain itu, revitalisasi budaya ini juga berkontribusi pada peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan wisata budaya. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan minimnya dukungan finansial. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan dari berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan revitalisasi budaya Rarakan.

10. Suwarlan E, Endah K. 2020. Peran Lembaga Adat Kampung Kuta Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Ciamis. Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi. 2020. Volume 8 Nomor 2

Potensi ancaman terhadap wilayah adat bisa terjadi di mana pun, tidak terkecuali pada wilayah adat kampung Kuta yang notabene selama ini memberi kontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup yang ada di Ciamis. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran lembaga adat Kampung Kuta yang dikenal sebagai kampung seribu larangan dalam mempertahankan nilai-nilai dan tradisi untuk melestarikan lingkungan hidup. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi informasi guna memperoleh kejelasan makna dari setiap peran yang ditunjukkan oleh para aktor dalam melestarikan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Adat Kampung Kuta dalam merencanakan pesan berawal dari nilai-nilai yang diwariskan secara turun-

temurun dengan istilah pamali. Nilai ini sangat efektif dan secara khusus memiliki implikasi positif dalam pelestarian lingkungan hidup. Kemudian peran dalam membuat pesan penyadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup tertuang dalam nasihat-nasihat yang berkembang dari mulut ke mulut yang diwariskan dari para leluhur. Selanjutnya peran dalam menyampaikan pesan berbasis dari keluarga sehingga nilai-nilainya bisa ditanamkan sejak dini. Peran Komunitas Adat dalam mempraktikkan nilai-nilai sesungguhnya ada dalam seluruh aspek kehidupan, secara khusus peran kuncen dalam menjaga hutan keramat atau Leuweung Gede sangat menentukan dan berpengaruh terhadap kelestariannya sampai saat ini. Secara keseluruhan empat peran dalam melestarikan lingkungan hidup berbasis nilai-nilai kearifan lokal diperankan oleh kuncen, sesepuh, dan ketua adat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut selanjutnya penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Implikasi
1	Desy Nayanti, 2025	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Balida Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.	Pengelolaan dana desa secara umum cukup efektif, tetapi ada masalah dengan waktu dan target yang tidak tercapai. Cuaca dan keterbatasan dana menjadi kendala. Meskipun prosedur dan kemampuan aparat masih kurang, partisipasi masyarakat cukup tinggi	Kepala Desa dan perangkat desa dapat meningkatkan pengawasan dan penggunaan dana desa.

2	Mulyana (2024)	Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	Pemerintah Desa Tambusai Batang Dui telah menyusun program yang berkelanjutan dan dapat melibatkan partisipasi masyarakat desa secara luas.	Perlunya pemerintah desa memperhatikan berbagai dimensi dalam penggunaan dana desa sehingga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan.
3	Nasution (2023).	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.	Pembangunan infrastruktur jalan di pemerintahan kampung telah berjalan cukup baik dengan dukungan komunikasi dan komitmen perangkat kampung. Namun, pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia, jumlah pegawai, serta sarana dan prasarana. Selain itu, kurangnya transparansi penggunaan Alokasi Dana Desa menyebabkan partisipasi masyarakat belum optimal sehingga target pengalokasian dana belum sepenuhnya tercapai.	Perlunya peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan transparansi penggunaan Alokasi Dana Desa agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dapat meningkat dan pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih optimal.
4	Maria Vianey Rae (2022)	Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur.	Pengelolaan dana desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan telah dilaksanakan walaupun belum optimal.	Pemerintah desa perlu memperhatikan dimensi-dimensi dalam pengelolaan dana desa.

5	Supriadin, (2024)	Efektivitas pemanfaatan dana desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan.	Pemanfaatan dana desa secara optimal mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, yang berkontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, terdapat beberapa kendala.	Perlunya peningkatan pelatihan bagi aparat desa, penguatan pengawasan penggunaan dana, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.
6	Milda Andini (2025)	Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2023	Penggunaan dana desa termasuk dalam kategori efektif, dengan indikator keberhasilan program, kepuasan masyarakat, dan pencapaian sasaran berada di atas 70%. Pembangunan infrastruktur juga mengalami peningkatan signifikan	Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
7	Isanini Fathor, 2024	Efektivitas Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Kolor.	Efektivitas penggunaan dana desa di Desa Kolor dimulai dari perencanaan yang baik, yang melibatkan musyawarah desa (Musdes) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas program.	Efektivitas pengelolaan dana desa masih perlu dievaluasi lebih lanjut terkait dengan transparansi dan partisipasi yang berkelanjutan
8	Aan Anwar Sihabudin, 2023.	Strategi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dalam Peningkatan Pelestarian Seni	Pengembangan pelestarian untuk memanfaatkan potensi seni dan kebudayaan guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat	Untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan kebudayaan daerah yang digambarkan dengan indikator penyelenggaraan

		Dan Kebudayaan Guna Mewujudkan Visi Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa. Dinamika:	istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	festival seni dan budaya
9	Arie Budiawan, 2024	Pelaksanaan Revitalisasi Budaya Rarakaan Sebagai Kearifan Lokal di Desa Sukaharja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis	Upaya revitalisasi budaya Rarakan telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya lokal. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, seperti lomba tumpeng, lomba membuat makanan tradisional, dan merangkai gunungan hasil pertanian masyarakat dalam upacara adat, berhasil menghidupkan kembali tradisi yang hampir terlupakan	Perlunya upaya berkelanjutan dari berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan revitalisasi budaya Rarakan.
10	Suwarlan E, Endah K. 2020	Peran Lembaga Adat Kampung Kuta Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Ciamis.	Peran Lembaga Adat Kampung Kuta dalam merencanakan pesan berawal dari nilai-nilai yang diwariskan secara turun- temurun dengan istilah pamali sudah baik. Nilai ini sangat efektif dan secara khusus memiliki implikasi positif dalam pelestarian lingkungan hidup	Perlunya kolaborasi semua pihak dalam pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal.

Perbandingan antara hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya kesamaan sekaligus perbedaan dalam fokus kajian. Beberapa penelitian terdahulu umumnya menekankan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa yang efektif berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan desa, irigasi, dan sarana umum lainnya. Penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menyoroti aspek pengelolaan keuangan desa secara umum, seperti transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran mampu meningkatkan kualitas pembangunan fisik serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu menganalisis pengaruh efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan fisik desa dengan menggunakan dimensi efektivitas program yang meliputi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Selain itu, pembangunan fisik dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu kuantitas pembangunan fisik, kualitas pembangunan fisik, serta fungsional atau manfaat pembangunan fisik bagi masyarakat. Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai sejauh mana dana desa dikelola, tetapi juga melihat secara langsung dampaknya terhadap hasil pembangunan infrastruktur yang dirasakan masyarakat.

Adapun kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang menghubungkan dimensi efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa secara lebih terstruktur dengan dimensi pembangunan fisik desa. Penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dengan mengkaji bagaimana ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, dan pemantauan program mempengaruhi kuantitas, kualitas, serta manfaat pembangunan fisik di desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian mengenai pengelolaan dana desa serta menjadi referensi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik yang berkualitas.

2.2 Kerangka Pemikiran

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dana tersebut diberikan kepada pemerintah desa untuk membiayai berbagai program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar di wilayah desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang efektif sangat penting agar dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui pengelolaan yang baik, dana desa diharapkan mampu mempercepat pembangunan fisik desa seperti jalan desa, sarana air bersih, irigasi, serta fasilitas umum lainnya yang menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat

Dalam praktiknya, keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah desa merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi penggunaan Alokasi Dana Desa. Pengelolaan dana yang dilakukan secara transparan, partisipatif, dan tepat sasaran akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembangunan fisik di desa. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan infrastruktur desa. Ketika dana desa dikelola secara efektif, maka pembangunan fisik yang dihasilkan tidak hanya meningkat dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas serta manfaatnya bagi masyarakat.

Menurut Budiani (2021:45), efektivitas suatu program dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Ketepatan sasaran program berkaitan dengan kesesuaian antara program yang direncanakan dengan kebutuhan masyarakat. Sosialisasi program menunjukkan sejauh mana pemerintah desa menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai program yang akan dilaksanakan. Pencapaian tujuan program menggambarkan tingkat keberhasilan program dalam mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan pemantauan program berkaitan dengan proses pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program agar berjalan sesuai rencana.

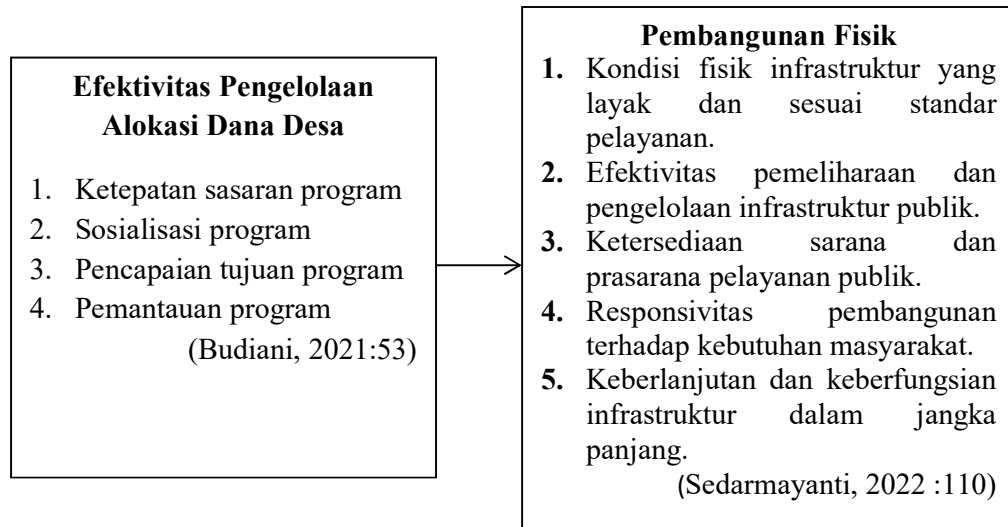
Sementara itu, Azhar dan Januri (2022:67) menjelaskan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa yang efektif akan berdampak pada peningkatan pembangunan desa, terutama pada pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat. Infrastruktur desa yang baik akan meningkatkan

aksesibilitas, memperlancar aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan dana desa menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembangunan fisik di desa.

Budiani, (2021:53) menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat diukur melalui ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Selanjutnya pembangunan fisik desa dapat dilihat melalui beberapa dimensi, menurut Arsyad, (2016:24) yaitu kuantitas pembangunan fisik, yang berkaitan dengan jumlah infrastruktur yang dibangun; kualitas pembangunan fisik, yang berkaitan dengan mutu dan ketahanan bangunan; serta fungsional atau manfaat pembangunan fisik, yaitu sejauhmana infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur melalui ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program diduga memiliki pengaruh terhadap kualitas pembangunan fisik desa yang dilihat dari kondisi fisik infrastruktur yang layak dan sesuai standar pelayanan, efektivitas pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur publik, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, responsivitas pembangunan terhadap kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan dan keberfungsian infrastruktur dalam jangka panjang. Dengan kata lain, semakin efektif pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka semakin baik pula hasil pembangunan fisik yang dirasakan oleh masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk lebih memperjelas mengenai pengaruh efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap kualitas pembangunan fisik dapat digambarkan dalam paradigma penelitian berikut ini:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap suatu permasalahan penelitian yang kebenarannya masih harus dibuktikan melalui pengumpulan dan analisis data secara empiris. Hipotesis disusun berdasarkan teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu sehingga dapat menjadi pedoman bagi peneliti dalam menguji hubungan atau pengaruh antarvariabel. Menurut Sugiyono (2022:64), hipotesis adalah : "Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan mengenai hubungan antarvariabel, yang kebenarannya masih harus diuji berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan".

Dengan demikian, hipotesis berfungsi sebagai dasar untuk melakukan pengujian secara ilmiah guna mengetahui apakah dugaan tersebut dapat diterima atau ditolak.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah ***“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Kualitas Pembangunan Fisik.”***